

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KOTA MALANG 2014-2018

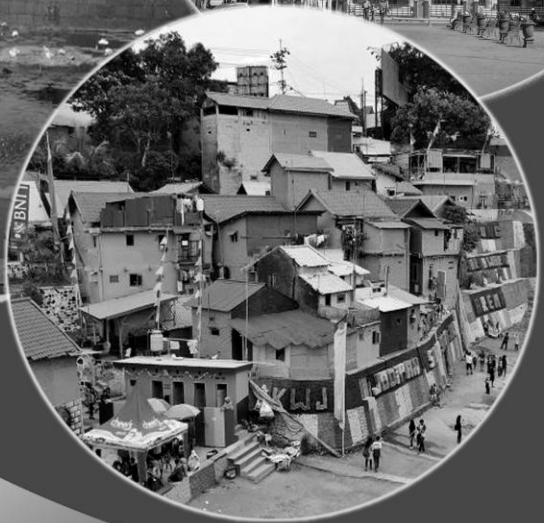


<https://malangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MALANG**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KOTA MALANG 2014-2018



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA MALANG
MENURUT PENGELUARAN 2014- 2018**

Nomor Publikasi : 35730.1908
Katalog BPS : 9302020.3573

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 76 halaman

Naskah:
BPS Kota Malang

Gambar Kulit:
BPS Kota Malang

Diterbitkan Oleh:
© BPS Kota Malang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA MALANG
MENURUT PENGELUARAN 2014 - 2018

Pengarah
Drs. Sunaryo, M.Si.

Penanggung Jawab
Ir. Ernawaty, MM.

Penyunting
Ir. Ernawaty, MM.

Penulis dan Pengolah Data
Ratri Adhipradani Ratih, S.Si

Desain Cover dan Tata Letak
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Malang, Agustus 2019

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kota Malang

Drs. SUNARYO, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB.....	3
1.3. Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	4
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	10
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	24
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	28
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA MALANG BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA MALANG TAHUN 2014-2018	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kota Malang Menurut Pengeluaran	31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	38
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	43
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	44
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	47
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	49
3.7 Perkembangan Ekspor	50
3.8 Perkembangan Impor	51
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KOTA MALANG TAHUN 2014-2018	53
4.1 PDRB (Nominal)	54
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	55
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	56
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	57

4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	58
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	59
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	60
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	61
4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	62
	PENUTUP	67
	LAMPIRAN	68
	DAFTAR PUSTAKA	75

<https://malangkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018	32
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018	34
Tabel 3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018	36
Tabel 4	Pertumbuhan Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018..	37
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	38
Tabel 6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	39
Tabel 7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	41
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	42
Tabel 9	Perubahan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	43
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRK Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	44
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	45
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	48
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	49
Tabel 15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	50
Tabel 16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	52

Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	54
Tabel 18	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2014 - 2018	55
Tabel 19	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2014 - 2018	56
Tabel 20	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	57
Tabel 21	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2014 - 2018	58
Tabel 22	Rasio PDRB terhadap Impor Kota Malang Tahun 2014 - 2018	59
Tabel 23	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	60
Tabel 24	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kota Malang Tahun 2014 - 2018	62
Tabel 26	Incremental Capital Output Ratio, Kota Malang, Tahun 2014 - 2018	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018.....	33
Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018.....	34
Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018.....	35
Grafik 4. Distribusi PDRB menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018.....	36
Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018.....	37

<https://malangkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang	68
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	69
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	70
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	71
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	72
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Timur	73



BAB I
PENDAHULUAN

<https://malangkota.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional. Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts*(SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi

maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA2008?

SNA2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB. SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- a. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- b. Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- c. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- d. Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- e. Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- f. Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- **Konsep dan Cakupan**

- a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industry pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industry yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- **Metodologi**

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- **Valuasi**

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan klasifikasi PDRB Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5. Ekspor	6. Ekspor
6. Impor	7. Impor

<https://malangkota.bps.go.id>



BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://malangkota.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Komponen konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan

8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Peralengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu.

Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai komponen tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Komponen ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya

harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-

cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
 i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
 j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Komponen konsumsi pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut+ pengeluaran akhir

seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa

beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overall mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan

- Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
 - i. Publikasi Statistik Konstruksi.
 - j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di

dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "*ekstrapolasi*" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang

sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau

belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak

langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor disuatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang

dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*)

dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://malangkota.bps.go.id>



BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA MALANG
MENURUT PDRB PENGELUARAN
2014 - 2018

<https://malangkota.bps.go.id>

Proses pembangunan ekonomi yang terjadi di Kota Malang pada periode 2014 sampai dengan 2018 mengakibatkan perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Malang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut

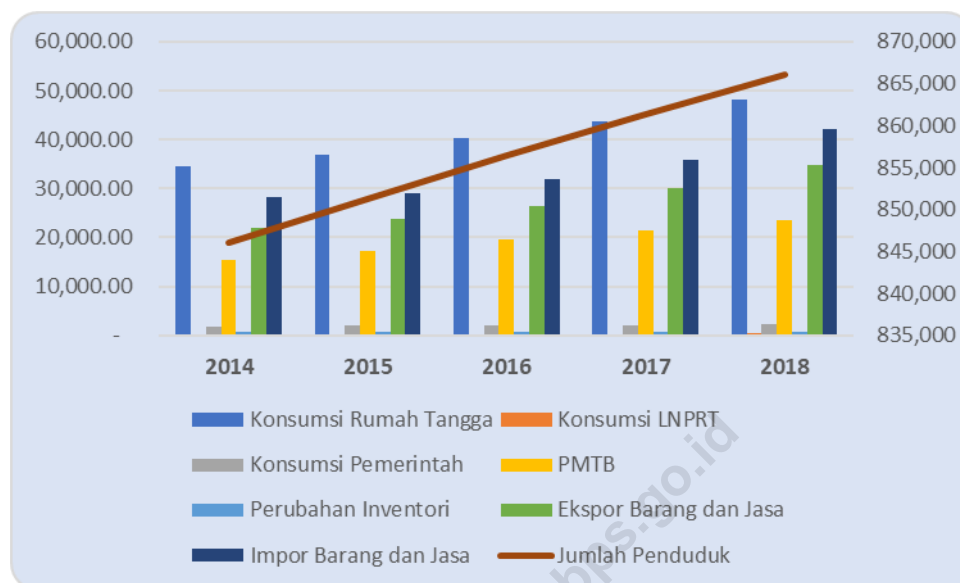
3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB KOTA MALANG MENURUT PENGELUARAN

Selama tahun 2014-2018 perekonomian Kota Malang menunjukkan tanda peningkatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang menunjukkan arah positif dan terus meningkat. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB maupun ADHK, serta pertumbuhan total.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	<i>(Miliar Rp)</i>				
	2014	2015	2016	2017	2108
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	34 477,07	36 876,20	40 398,84	43 737,88	48 175,40
2. Konsumsi LNPRT	242,56	250,04	268,73	287,96	326,64
3. Konsumsi Pemerintah	1 843,17	1 991,80	1 916,28	2 091,28	2 349,78
4. PMTB	15 455,03	17 247,23	19 481,08	21 385,22	23 571,33
5. Perubahan Inventori	749,19	725,52	723,72	724,49	758,69
6. Ekspor Barang dan Jasa	22 067,06	23 788,33	26 417,52	29 988,09	34 865,10
7. Impor Barang dan Jasa	28 270,86	29 054,73	32 035,56	35 855,61	42 112,01
Total PDRB	46 563,21	51 824,39	57 170,60	62 359,30	67 934,93

Grafik 1. PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang
Tahun 2014 - 2018



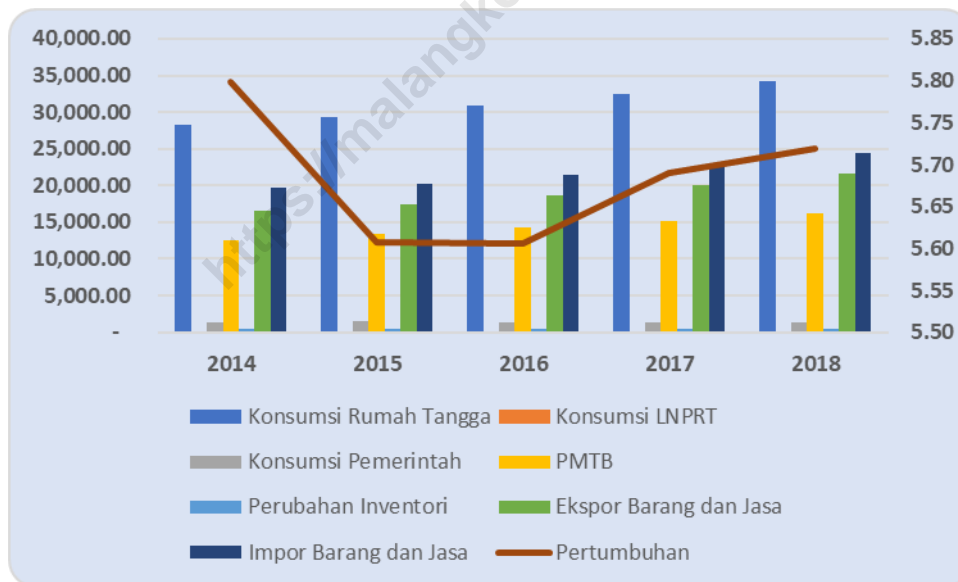
Nilai PDRB Kota Malang adh Berlaku selama periode tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

PDRB menurut pengeluaran selain dinilai atas dasar harga Berlaku juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2014–2018, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Malang berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

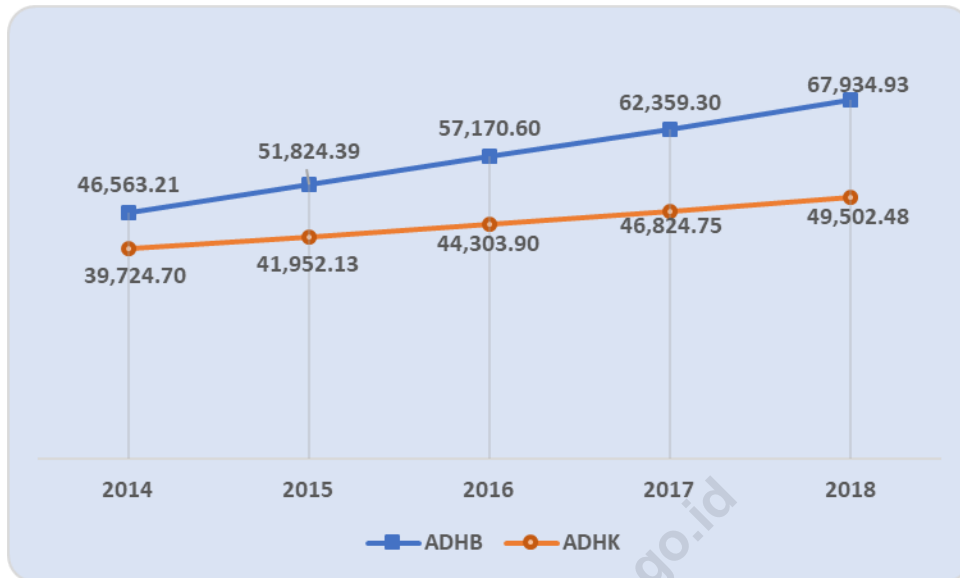
**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kota Malang
Tahun 2014-2018**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2014	2015	2016	2017	2108
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	28 340,03	29 357,92	30 838,46	32 405,85	34 136,19
2. Konsumsi LNPRT	178,98	171,58	178,13	185,08	198,41
3. Konsumsi Pemerintah	1 399,88	1 431,00	1 305,31	1 343,25	1 409,38
4. PMTB	12 505,08	13 456,21	14 330,20	15 226,80	16 256,96
5. Perubahan Inventori	446,24	421,66	409,61	409,61	410,13
6. Ekspor Barang dan Jasa	16 517,58	17 347,57	18 685,01	19 989,03	21 558,81
7. Impor Barang dan Jasa	19 663,09	20 233,80	21 442,82	22 734,87	24 467,40
Total PDRB	39 724,70	41 952,13	44 303,90	46 824,75	49 502,48

**Grafik 2. PDRB Atas Harga Kontan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang
Tahun 2014 - 2018**



Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 – 2018



Nilai PDRB adh Berlaku yang pada umumnya lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan dapat dilihat pada grafik di bawah. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

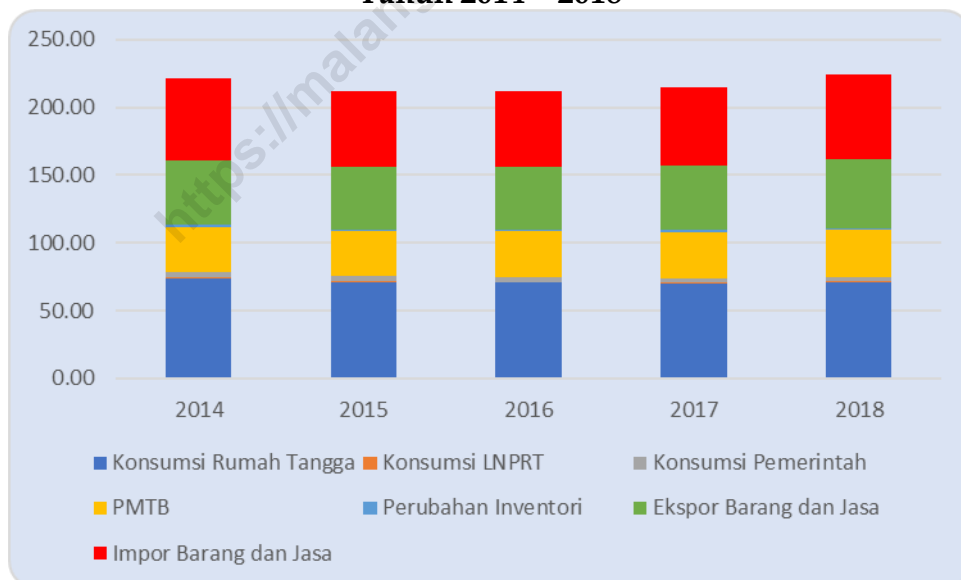
Total PDRB atau terbentuknya keseluruhan PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor luar negeri, impor luar negeri dan net ekspor antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran,
Kota Malang Tahun 2014 – 2018**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Konsumsi Rumah Tangga	74,04	71,16	70,66	70,14	70,91
2, Konsumsi LNPRT	0,52	0,48	0,47	0,46	0,48
3, Konsumsi Pemerintah	3,96	3,84	3,35	3,35	3,46
4, PMTB	33,19	33,28	34,08	34,29	34,70
5, Perubahan Inventori	1,61	1,40	1,27	1,16	1,12
6, Ekspor Barang dan Jasa	47,39	45,90	46,21	48,09	51,32
7, Impor Barang dan Jasa	60,72	56,06	56,04	57,50	61,99
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran, Kota Malang
Tahun 2014 - 2018**

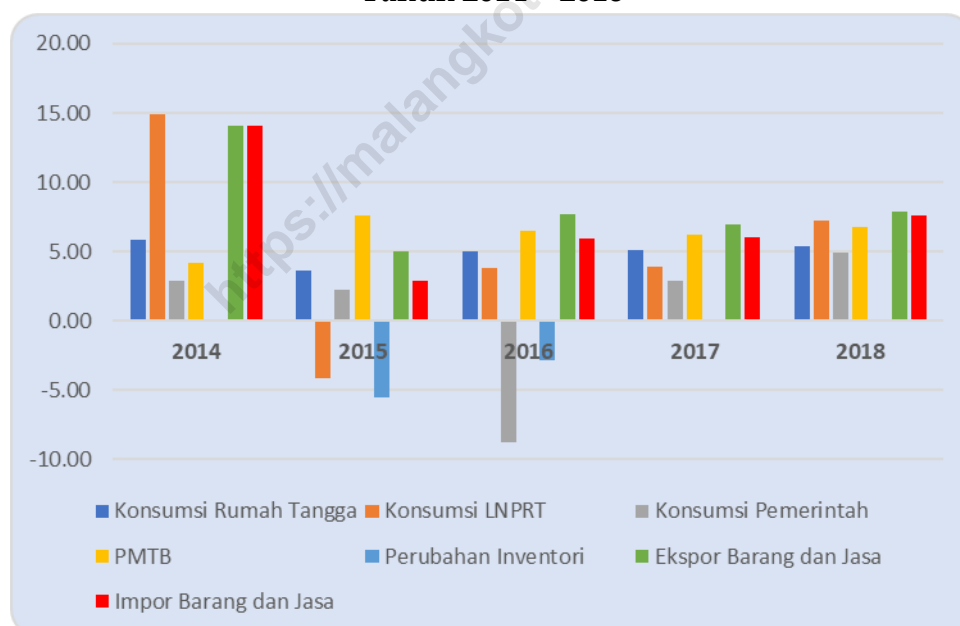


Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 – 2018

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,84	3,59	5,04	5,08	5,34
2. Konsumsi LNPR	14,95	-4,14	3,82	3,90	7,20
3. Konsumsi Pemerintah	2,89	2,22	-8,78	2,91	4,92
4. PMTB	4,14	7,61	6,50	6,26	6,77
5. Ekspor Barang dan Jasa	14,12	5,02	7,71	6,98	7,85
6. Impor Luar Negeri	14,08	2,90	5,98	6,03	7,62
Total PDRB	5,80	5,61	5,61	5,69	5,72

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2014 - 2018



Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang dari tahun 2014 sampai dengan 2018 secara rata-rata mencapai 5,69 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,80 persen (2014); 5,61 persen (2015); 5,61 persen (2016); 5,69 persen (2017) dan 5,72 persen (2018). Pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 5,80 persen, sedangkan tahun 2015 dan 2016 pertumbuhannya menunjukkan besaran yang dapat dikatakan sama yaitu 5,61 persen

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kota Malang, Tahun 2014–2018**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	121,66	125,61	131,00	134,97	141,13
2. Konsumsi LNPRT	135,52	145,73	150,86	155,59	164,63
3. Konsumsi Pemerintah	131,67	139,19	146,81	155,69	166,72
4. PMTB	123,59	128,17	135,94	140,44	144,99
5. Ekspor Barang dan Jasa	167,89	172,06	176,68	176,87	184,99
6. Impor Barang dan Jasa	133,60	137,13	141,38	150,02	161,72
Total PDRB	143,78	143,59	149,40	157,71	172,11

Indeks implisit¹ PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri).

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga secara struktur menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

¹ Indeks perkembangan

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga,
Kota Malang, Tahun 2014 – 2018**

(Miliar, Rp)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	34 477,07	36 876,20	40 398,84	43 737,88	48 175,40
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	28 340,03	29 357,92	30 838,46	32 405,85	34 136,19
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	74,04	71,16	70,66	70,14	70,91
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	204 814,81	226 530,96	248 407,99	269 378,79	291 870,63
b. ADHK 2010	174 734,66	183 378,03	192 501,79	202 272,86	212 678,78
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	55 041,02	60 876,91	66 756,11	72 391,79	78 436,12
b. ADHK 2010	46 957,41	49 280,19	51 732,12	54 358,01	57 154,42
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	5,84	3,59	5,04	5,08	5,34
b. Per-Rumah Tangga	5,15	4,95	4,98	5,08	5,14
c. Perkapita	5,15	4,95	4,98	17,96	5,14
Jumlah Rumah Tangga (unit)	227 343	228 774	230 148	231 493	232 757
Jumlah penduduk (org)	845 973	851 298	856 410	861 414	866 118

Tabel 6 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014- 2018 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik secara nominal maupun riil, konsumsi ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2014 s.d 2018 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 74,04 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 70,14 persen.

Rata-rata konsumsi rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2014, setiap rumah tangga di Kota Malang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 204.818,81 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik berupa makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

konsumsi rumah tangga ini terus meningkat menjadi 226.530,96 ribu rupiah (2015); 248.407,99 ribu rupiah (2016); 269.378,79 ribu rupiah (2017); dan 291.870,63 ribu rupiah (2018).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan melambat dari 5,84 persen ditahun 2014 menjadi sebesar 3,59 persen (2015). Namun tahun berikutnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,04 persen (2016), 5,08 persen (2017) dan meningkat lagi menjadi 5,34 persen (2018). Pertumbuhan konsumsi per-kapita selaras dengan pertumbuhan konsumsi total adh Konstan dari 5,15 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,95 persen pada tahun 2015 dan 4,98 tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan konsumsi per-kapita naik menjadi 5,08 persen dan 5,14 persen. Peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB.

Sementara, pada PDRB adh Konstan 2010, rata-rata konsumsi per rumah tangga diperkirakan tumbuh pada kisaran 3 sampai 5 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang sebesar 5,15 persen. Begitu pula dengan rata-rata nilai konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kota Malang meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun. Peningkatan pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 4,95 sampai dengan 5,15 persen. Peningkatan ini tentunya berpengaruh pula terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2014 – 2018³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,89	28,53	28,37	27,95	27,52
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,22	4,17	4,16	4,19	4,24
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	11,34	11,27	11,17	11,16	11,10
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,58	6,99	7,01	7,15	7,25
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	29,41	29,49	29,61	29,91	30,15
f. Hotel dan Restoran	13,76	13,79	13,89	13,90	14,01
g. Lainnya	5,79	5,77	5,80	5,75	5,74
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Malang dari tahun 2014-2018 adalah konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun dari tahun ke tahun, yaitu dari 28,29 persen (2014) ; 28,53 persen (2015) ; 28,37 persen (2016) ; 27,95 persen (2017) ; dan 27,52 persen (2018). Sementara untuk kelompok pengeluaran bukan makanan tertinggi ada pada subkomponen transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang berada pada kisaran 29 sampai 30 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kota Malang, Tahun 2014 – 2018

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,83	2,33	3,46	3,59	4,38
Bukan Makanan	7,51	4,09	5,66	5,65	5,70
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,03	4,15	4,10	4,17	4,20
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	3,49	3,34	5,37	5,38	6,39
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,54	5,70	5,77	5,87	7,55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,39	4,92	6,53	6,51	4,88
f. Hotel dan Restoran	7,31	2,54	4,68	4,92	4,18
g. Lainnya	6,21	2,92	4,77	4,05	8,64

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan berfluktuasi, dengan masing-masing sebesar 7,51 persen (2014) ; 4,09 persen (2015) ; 5,66 persen (2016) ; 5,65 persen (2017) dan 5,70 persen (2018). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Perubahan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2014 – 2018⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,86	3,23	5,31	2,97	3,89
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,40	1,32	5,06	4,62	6,92
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	4,54	2,80	3,03	2,68	4,08
d. Kesehatan dan Pendidikan	1,75	7,47	3,92	4,20	5,58
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,83	2,24	3,23	2,68	4,14
f. Hotel dan Restoran	5,01	4,52	5,41	3,32	5,67
g. Lainnya	4,87	3,44	5,13	3,14	5,84

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Tingkat perubahan harga secara implisit disajikan dalam tabel diatas menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk setiap kelompok konsumsi rumah tangga. Selama periode 2014 - 2018 peningkatan harga (inflasi) berfluktuasi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 2,86 persen (2014) ; 3,23 persen (2015) ; 5,31 persen (2016) ; 2,97 persen (2017) ; dan 3,89 persen (2018). Sementara itu, konsumsi bukan makanan dari 4,74 persen (2014) menjadi 3,27 persen (2015). Kemudian pada tahun berikutnya sebesar 3,91 persen (2016), 3,07 persen (2017) dan 4,83 persen (2018).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi dan secara tidak langsung juga mampu meningkatkan nilai PDRB wilayah tersebut. Data berikut menunjukkan proporsi lembaga non profit (LNPRT) terhadap PDRB.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Kota Malang, Tahun 2014 – 2018**

	<i>(Miliar, Rp)</i>				
Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB <i>(Miliar Rp)</i>	242,56	250,04	268,73	287,96	326,64
b. ADHK 2010 <i>(Miliar Rp)</i>	178,98	171,58	178,13	185,08	198,41
Proporsi terhadap PDRB <i>(% ADHB)</i>	0,52	0,48	0,47	0,46	0,48

Selama periode tahun 2014 - 2018 konsumsi LNPRT baik secara adh Berlaku maupun adh Konstan 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 konsumsi LNPRT adh Berlaku sebesar 242,56 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 250,04 miliar rupiah (2015), 268,73 miliar rupiah (2016), 287,96 miliar rupiah (2017) dan 326,64 miliar rupiah (2018). Demikian juga

dengan konsumsi LNPRT secara adh Konstan yaitu sebesar 178,98 miliar rupiah pada tahun 2014 dan selanjutnya meningkat hingga sebesar 198,41 miliar rupiah pada tahun 2018. Jika dilihat peranannya, proporsi konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) relatif stabil selama periode 2014 - 2018 dan merupakan komponen yang paling kecil kontribusinya dalam pengeluaran produk domestik regional bruto yaitu pada kisaran kurang dari 1 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah terdiri dari konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT. Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 1.843,17 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2018 nilainya mencapai 2.349,78 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Malang, Tahun 2014 - 2018

(Miliar, Rp)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 843,17	1 991,80	1 916,28	2 091,28	2 349,78
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1 399,88	1 431,00	1 305,31	1 343,25	1 409,38
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,96	3,84	3,35	3,35	3,46
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	2 178,76	2 339,73	1 993,19	2 427,73	2 713,00
b. ADHK 2010	1 654,76	1 680,96	1 357,70	1 559,35	1 627,24
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	188 907,56	206 254,98	243 987,58	285 265,75	329 562,09
b. ADHK 2010	143 474,64	148 182,19	166 197,30	183 228,74	197 669,21
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	2,89	2,22	-8,78	2,91	4,92
b. Konsumsi perkapita	2,27	1,58	-19,23	14,85	4,35
c. Konsumsi per-pegawai	0,55	3,28	12,16	10,25	7,88
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁶	9 757	9 657	7 854	7 331	7 130
Jumlah penduduk (000 org)	845 973	851 298	961 414	861 414	866 118

Apabila dicermati lebih lanjut proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung menurun, dari 3,96 persen ditahun 2014 menjadi 3,46 persen pada tahun 2018. Sepanjang periode 2014-2018, proporsi terendah terjadi pada periode tahun 2016-2017; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2014 yang mencapai 3,96 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

⁶ Tidak termasuk polisi dan militer

2.178,76 ribu rupiah, dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 2,27 persen pada tahun 2014 turun menjadi 1,58 (2015), minus 9,33 persen di tahun 2016 namun pada periode tahun 201 sd. 2018 kembali meningkat menjadi 2,31 persen (2017) dan 4,35 persen (2018)

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2014 konsumsi per-pegawai pemerintah sebesar 188.907,56 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 206.254,98 ribu rupiah (2015); 243.987,58 ribu rupiah (2016); 285.266,75 ribu rupiah (2017) dan 329.562,09 ribu rupiah (2018). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 12,16 persen.

Selama periode tahun 2014-2018 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010) kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan dikarenakan pada tahun tersebut ada kebijakan pemerintah pusat yaitu penghematan anggaran terutama untuk belanja barang, perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan di hotel. Disisi lain jumlah pegawai pemerintah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 9.757 orang dan menurun menjadi 9.657 tahun 2015 dan pada tahun 2016 kembali turun sebanyak 7.854 orang, sebesar 7.331 orang (2015) dan 7.130 orang (2016). Penurunan pegawai terkait adanya moratorium dari pemerintah untuk tidak merekrut pegawai baru, selain itu juga banyak pegawai pemerintah yang sudah purna tugas.

Gambaran konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun per penduduk. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, total konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 4,92 persen ; untuk konsumsi per-kapita 4,35 persen. sedangkan untuk konsumsi per-pegawai sebesar 7,88 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Di dalam PDRB menurut pengeluaran komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. PMTB dalam PDRB Pengeluaran dibagi menjadi dua subkomponen, yaitu sub komponen bangunan dan non bangunan. Jika dilihat strukturnya, proporsi non bangunan terhadap total PMTB cenderung menurun selama periode 2014 - 2018 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB. Sedangkan proporsi sub komponen bangunan terhadap total PMTB cenderung naik selama periode tahun 2014 - 2018.

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kota Malang, Tahun 2014 – 2018**

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	15 455,03	17 247,23	19 481,08	21 385,22	23 571,33
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	12 505,08	13 456,21	14 330,20	15 226,80	16 256,96
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	33,19	33,28	34,08	34,29	34,70
Struktur PMTB ⁸					
a. Bangunan (Miliar Rp) (%)	13 305,14 (86,09)	14 948,07 (86,67)	17 018,16 (87,36)	18 685,86 (87,38)	20 646,77 (87,59)
b. Non Bangunan (Mil Rp) (%)	2 149,89 (13,91)	2 299,17 (13,33)	2 462,92 (12,64)	2 699,36 (12,62)	2 924,57 (12,41)
Total PMTB (Miliar Rp) (%)	15 455,03 (100 00)	17 247,23 (100 00)	19 481,08 (100 00)	21 385,22 (100 00)	23 571,33 (100 00)
Pertumbuhan ⁹ (%)					
a. Bangunan	4,27	8,38	6,71	6,42	7,04
b. Non Bangunan	3,42	3,03	5,18	5,23	5,01
Total PMTB	4,14	7,61	6,50	6,26	6,77

Jika dilihat pertumbuhannya, masing-masing komponen PMTB pertumbuhannya sangat bervariasi setiap tahunnya. Pertumbuhan sub komponen bangunan maupun non bangunan mempunyai pola yang variatif. Pada tahun 2014 pertumbuhan sub komponen bangunan sebesar 4,27 persen kemudian naik pada tahun 2015 menjadi 8,38 persen dan menurun pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 6,71 persen dan 6,42 persen. Namun pada tahun 2018 meningkat hingga pertumbuhannya mencapai 7,04 persen. Sedangkan sub komponen Non Bangunan tumbuh 3,42 persen tahun 2014 turun menjadi 3,03 persen (2015). Kemudian naik menjadi 5,18 persen (2016) dan kembali naik 5,23 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tumbuh melambat sebesar 5,01 persen.

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2014-2018 pertumbuhan PMTB berfluktuasi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai

⁸Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

besaran angka 7,61 persen dan terendah terjadi pada tahun 2014 yang hanya sebesar 4,14 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Malang, Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	749,19	725,52	723,72	724,49	758,69
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	446,24	421,66	409,61	409,61	410,13
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,61	1,40	1,27	1,16	1,12

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja.

Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2014 perubahan inventori mencapai 749,19 miliar rupiah, kemudian tahun 2015 perubahan inventori nilainya sebesar 725,52 miliar rupiah. Perubahan inventori pada periode tahun 2016-2017 masih relatif sama yakni sebesar 723,72 miliar rupiah dan 724,49 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2018 perubahan inventori meningkat sebesar 758,69 miliar rupiah.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Transaksi ekspor dalam struktur permintaan akhir menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Malang, Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	22 067,06	23 788,33	26 417,52	29 988,09	34 865,10
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	16 517,58	17 347,57	18 685,01	19 989,03	21 558,81
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	47,39	45,90	46,21	48,09	51,32
Pertumbuhan (%)	14,12	5,02	7,71	6,98	7,85

Nilai ekspor tahun 2014-2018 secara total menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 nilai ekspor sebesar 22.067,06 miliar rupiah dan tahun 2015 meningkat menjadi 23.788,33 miliar rupiah. Tahun 2016 ekspor meningkat lagi menjadi 26.417,52 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, nilai ekspor menjadi

sebesar 29.988,09 miliar rupiah (2017), dan mencapai 34.865,1 miliar rupiah pada tahun 2018. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 16.517,58 miliar rupiah (2014); 17.347,57 miliar rupiah (2015); 18.685,01 miliar rupiah (2016); 19.989,03 miliar rupiah (2017); dan menjadi sebesar 21.558,81 miliar rupiah (2018). Jika dilihat dari proporsinya selama kurun waktu 2014–2018, terdapat penurunan proporsi pada periode tahun 2015 dan 2016, yaitu dari 47,39 persen pada tahun 2014 menjadi 45,90 persen di tahun 2015 dan 46,21 di tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 proporsi nya meningkat menjadi 48,09 persen sedikit meningkat lagi menjadi 51,32 persen pada tahun 2018.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Malang. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Malang terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Malang di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kota Malang, Tahun 2014-2018**

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	28 270,86	29 054,73	32 035,56	35 855,61	42 112,01
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	19 663,09	20 233,80	21 442,82	22 734,87	24 467,40
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	60,72	56,06	56,04	57,50	61,99
Pertumbuhan (%)	14,08	2,90	5,98	6,03	7,62

Tabel 16 di atas menunjukkan pola perkembangan impor Kota Malang pada periode tahun 2014-2018 yang cenderung meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Pada tahun 2015 nilai impor mengalami peningkatan dimana nilainya mencapai 29.054,73 miliar rupiah dibanding tahun 2014 yang hanya sebesar 28.270,86 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya nilai impor terus mengalami peningkatan hingga mencapai 42.112,01 miliar rupiah pada tahun 2018.

Proporsi impor selama periode 2014 - 2018 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 proporsi impor terhadap PDRB sebesar 60,72 persen dan terus meningkat menjadi sebesar 61,99 persen pada tahun 2018. Sementara pada tahun 2015 sampai tahun 2016 proporsi impor menurun menjadi sebesar 56,06 persen dan 56,03 persen. Namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 57,50 persen.

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2014 sebesar 14,08 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan impor cenderung melambat hanya sebesar 2,90 persen. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan impor sedikit meningkat mencapai 5,98 persen, sedangkan tahun 2017 dan 2018 menggeliat lagi dengan lebih cepat mencapai 6,03 persen dan 7,62 persen



BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAR PDRB
PENGELUARAN KOTA MALANG
2014 - 2018

<https://malangkota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Malang, Tahun 2014 – 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	46 563,21	51 824,39	57 170,60	62 359,30	67 934,93
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	39 724,70	41 952,13	44 303,90	46 824,75	49 502,48
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
c. ADHB	55 041,02	60 876,91	66 756,11	72 391,79	78 436,12
d. ADHK 2010	46 957,41	49 280,19	51 732,12	54 358,01	57 154,42
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	5,15	4,95	4,98	5,08	5,14
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	845 973	851 298	856 410	861 414	866 118
Pertumbuhan penduduk	0,61	0,63	0,60	0,58	0,55

Tabel 17 menunjukkan peningkatan PDRB per-kapita Kota Malang dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Malang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 2-5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,4 – 0,9 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Jawa Timur (sekitar 60 persen), artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Jawa Timur sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2014 – 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	34 477,07	36 876,20	40 398,84	43 737,88	48 175,40
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	22 067,06	23 788,33	26 417,52	29 988,09	34 865,10
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,56	1,55	1,53	1,46	1,38

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 1,56 kali dari yang diekspor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Selama periode 2014 – 2018, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan kecenderungan menurun. Secara implisit data tersebut menjelaskan, walaupun nilai konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor semakin meningkat namun peningkatan nilai ekspor jauh lebih cepat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan rasio tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekspor yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB

Tahun 2014 – 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) (<i>Miliar Rp</i>)	34 477,07	36 876,20	40 398,84	43 737,88	48 175,40
Total PMTB (ADHB) (<i>Miliar Rp</i>)	15 455,03	17 247,23	19 481,08	21 385,22	23 571,33
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,23	2,14	2,07	2,05	2,04

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun. Pada tahun 2014 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 2,23 menurun menjadi 2,14 pada tahun 2015. Sementara tahun-tahun berikutnya rasionya masih terus mengalami penurunan menjadi 2,07 (2016), 2,05 (2017) dan 2,04 (2018). Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Malang, Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	34 477,07	36 876,20	40 398,84	43 737,88	48 175,40
b. LNPRT	242,56	250,04	268,73	287,96	326,64
c. Pemerintah	1 843,17	1 991,80	1 916,28	2 091,28	2 349,78
Jumlah	36 562,80	39 118,04	42 583,84	46 117,12	50 851,82
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	46 563,21	51 824,39	57 170,60	62 359,30	67 934,93
Proporsi	78,52	75,48	74,49	73,95	74,85

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 70 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun

proporsinya terhadap PDRB justru relatif menurun. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang di ekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2014 – 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	22 067,06	23 788,33	26 417,52	29 988,09	34 865,10
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	15 455,03	17 247,23	19 481,08	21 385,22	23 571,33
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,43	1,38	1,36	1,40	1,48

Selama tahun 2014-2018, ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB. Walaupun rasio ekspor terhadap PMTB pada tahun 2014 sampai tahun 2016 juga mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun (tabel 21), namun mulai tahun 2017 nilainya kembali meningkat menjadi 1,4 dan meningkat kembali menjadi 1,48 di tahun 2018. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 22 menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2014 - 2018 cenderung meningkat dari sebesar 1,65 pada tahun 2014 menjadi 1,78, dan pada tahun 2015 nilainya relatif sama. Namun pada tahun berikutnya rasionya mengalami penurunan menjadi 1,74 (2017) dan 1,61 pada tahun 2018. Penurunan rasio menunjukkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang semakin meningkat.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Kota Malang Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	46 563,21	51 824,39	57 170,60	62 359,30	67 934,93
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	28 270,86	29 054,73	32 035,56	35 855,61	42 112,01
Rasio PDRB terhadap Impor	1,65	1,78	1,78	1,74	1,61

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kota Malang, Tahun 2014 – 2018**

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	46 563,21	51 824,39	57 170,60	62 359,30	67 934,93
%	62,22	64,08	64,09	63,49	61,73
<u>Total nilai Impor</u>					
ADHB (Miliar Rp)	28 270,86	29 054,73	32 035,56	35 855,61	42 112,01
%	37,78	35,92	35,91	36,51	38,27
<u>Total Permintaan</u>					
<u>Akhir</u> ¹⁰ (Miliar Rp)	74 834,07	80 879,12	89 206,16	98 214,92	110 046,94
%	(100 00)	(100 00)	(100 00)	(100 00)	(100 00)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, berkisar 30 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 74.834,07 miliar (2014) menjadi sebesar 110.046,94 miliar rupiah (2018).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 46.563.21 miliar rupiah (2014); 51.824,39 miliar rupiah (2015); 57.170,6 miliar rupiah (2016); 62.359,3 miliar rupiah (2017); dan 67.934,93 miliar rupiah (2018). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa di impor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 28.270.86 miliar rupiah (2014); 29.054.73 miliar rupiah (2015); 32.035.56 miliar rupiah (2016); 35.855.61 miliar rupiah (2017); dan 42.112.01 miliar rupiah (2018).

¹⁰ Termasuk diskrepansi statistik

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2014 - 2018, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Malang dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menggambarkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Malang cenderung dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Selama tahun 2014-2018 terjadi defisit perdagangan Kota Malang yang masing-masing tercatat sebesar 6.203,8 miliar rupiah (2014), 5.266,4 miliar rupiah (2015), 5.618,04 miliar rupiah (2016), 5.867,53 miliar rupiah (2017) dan meningkat menjadi 7.246,91 miliar rupiah (2018)

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Kota Malang Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	22 067,06	23 788,33	26 417,52	29 988,09	34 865,10
Nilai Impor (ADHB)(Miliar Rp)	28 270,86	29 054,73	32 035,56	35 855,61	42 112,01
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	6 203,80	5 266,40	5 618,04	5 867,53	7 246,91
Rasio ekspor thdp Impor	0,78	0,82	0,82	0,84	0,83

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung sama dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 rasionya sebesar 0,78; meningkat menjadi 0,82 pada tahun 2015 dan tahun 2016, dan kembali meningkat menjadi sekitar 0,84 pada tahun 2017, namun menurun sebesar 0,83 pada tahun 2018.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 26. Incremental Capital Output Ratio,
Kota Malang, Tahun 2014 - 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	39 724,70	41 952,13	44 303,90	46 824,75	49 502,48
Perubahan (miliar rupiah)	2 176,96	2 227,43	2 351,77	2 520,85	2 677,72
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	12 505,08	13 456,21	14 330,20	15 226,80	16 256,96
ICOR	5,74	6,04	6,09	6,04	6,07

Perkembangan besaran ICOR Kota Malang dalam kurun waktu 2014 - 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 26. Pada Tahun 2014, besaran ICOR Kota Malang mencapai 5,74 dan meningkat hampir setiap tahunnya. Pada tahun 2018, besaran ICOR mencapai 6,07. Hal tersebut mengartikan bahwa untuk menghasilkan 1 juta rupiah nilai tambah (*value-added*) dibutuhkan investasi sebesar 6,07 juta rupiah. Semakin meningkatnya nilai ICOR Kota Malang mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan satu unit tambahan output membutuhkan investasi yang semakin tahun semakin tinggi.

<https://malangkota.bps.go.id>



BAB V
PENUTUP

<https://malangkota.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2014 s.d 2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Malang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014 sampai dengan 2018, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-

Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar wilayah secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Malang terhadap ekonomi daerah lain (*rest of the world*).

<https://malangkota.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://malangkota.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	34 477,07	36 876,20	40 398,84	43 737,88	48 175,40
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	9 958,72	10 519,34	11 460,82	12 224,41	13 257,03
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1 456,57	1 537,10	1 681,14	1 832,14	2 041,15
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3 911,42	4 155,08	4 510,77	4 880,53	5 345,81
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2 268,95	2 577,25	2 832,85	3 125,17	3 494,52
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	10 139,38	10 875,99	11 960,08	13 079,95	14 523,08
1.f. Hotel dan Restoran	4 744,37	5 084,75	5 610,71	6 081,72	6 747,21
1.g. Lainnya	1 997,67	2 126,69	2 342,47	2 513,95	2 766,60
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	242,56	250,04	268,73	287,96	326,64
3. Konsumsi Pemerintah	1 843,17	1 991,80	1 916,28	2 091,28	2 349,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	15 455,03	17 247,23	19 481,08	21 385,22	23 571,33
4.a. Bangunan	13 305,14	14 948,07	17 018,16	18 685,86	20 646,77
4.b. Non-Bangunan	2 149,89	2 299,17	2 462,92	2 699,36	2 924,57
5. Perubahan Inventori	749,19	725,52	723,72	724,49	758,69
6. Ekspor	22 067,06	23 788,33	26 417,52	29 988,09	34 865,10
7. Impor	28 270,86	29 054,73	32 035,56	35 855,61	42 112,01
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	46 563,21	51 824,39	57 170,60	62 359,30	67 934,93

Tabel 2, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	28 340,03	29 357,92	30 838,46	32 405,85	34 136,19
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	8 020,74	8 207,35	8 491,17	8 795,65	9 181,32
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1 197,55	1 247,28	1 298,40	1 352,54	1 409,37
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3 349,57	3 461,33	3 647,19	3 843,24	4 044,70
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1 813,54	1 916,83	2 027,38	2 146,45	2 273,26
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	8 647,50	9 072,76	9 665,17	10 294,18	10 975,10
1.f. Hotel dan Restoran	3 592,56	3 683,68	3 856,13	4 045,69	4 247,58
1.g. Lainnya	1 718,58	1 768,69	1 853,02	1 928,10	2 004,85
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	178,98	171,58	178,13	185,08	198,41
3. Konsumsi Pemerintah	1 399,88	1 431,00	1 305,31	1 343,25	1 409,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	12 505,08	13 456,21	14 330,20	15 226,80	16 256,96
4.a. Bangunan	10 700,99	11 597,55	12 375,18	13 169,58	14 096,62
4.b. Non-Bangunan	1 804,09	1 858,66	1 955,03	2 057,22	2 160,34
5. Perubahan Inventori	446,24	421,66	409,61	409,61	410,13
6. Ekspor	16 517,58	17 347,57	18 685,01	19 989,03	21 558,81
7. Impor	19 663,09	20 233,80	21 442,82	22 734,87	24 467,40
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	39 724,70	41 952,13	44 303,90	46 824,75	49 502,48

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	74,04	71,16	70,66	70,14	70,91
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	21,39	20,30	20,05	19,60	19,51
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,13	2,97	2,94	2,94	3,00
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,40	8,02	7,89	7,83	7,87
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,87	4,97	4,96	5,01	5,14
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	21,78	20,99	20,92	20,98	21,38
1.f. Hotel dan Restoran	10,19	9,81	9,81	9,75	9,93
1.g. Lainnya	4,29	4,10	4,10	4,03	4,07
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,52	0,48	0,47	0,46	0,48
3. Konsumsi Pemerintah	3,96	3,84	3,35	3,35	3,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	33,19	33,28	34,08	34,29	34,70
4.a. Bangunan	28,57	28,84	29,77	29,96	30,39
4.b. Non-Bangunan	4,62	4,44	4,31	4,33	4,30
5. Perubahan Inventori	1,61	1,40	1,27	1,16	1,12
6. Ekspor	47,39	45,90	46,21	48,09	51,32
7. Impor	60,72	56,06	56,04	57,50	61,99
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,84	3,59	5,04	5,08	5,34
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,83	2,33	3,46	3,59	4,38
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,03	4,15	4,10	4,17	4,20
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,49	3,34	5,37	5,38	5,24
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,54	5,70	5,77	5,87	5,91
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,39	4,92	6,53	6,51	6,61
1.f. Hotel dan Restoran	7,31	2,54	4,68	4,92	4,99
1.g. Lainnya	6,21	2,92	4,77	4,05	3,98
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	14,95	(4,14)	3,82	3,90	7,20
3. Konsumsi Pemerintah	2,89	2,22	(8,78)	2,91	4,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,14	7,61	6,50	6,26	6,77
4.a. Bangunan	4,27	8,38	6,71	6,42	7,04
4.b. Non-Bangunan	3,42	3,03	5,18	5,23	5,01
5. Perubahan Inventori	4,685,77	(5,51)	(2,86)	-	0,13
6. Ekspor	14,12	5,02	7,71	6,98	7,85
7. Impor	14,08	2,90	5,98	6,03	7,62
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)					

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	121,66	125,61	131,00	134,97	141,13
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	124,16	128,17	134,97	138,98	144,39
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	121,63	123,24	129,48	135,46	144,83
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	116,77	120,04	123,68	126,99	132,17
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	125,11	134,45	139,73	145,60	153,72
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	117,25	119,88	123,74	127,06	132,33
1.f. Hotel dan Restoran	132,06	138,03	145,50	150,33	158,85
1.g. Lainnya	116,24	120,24	126,41	130,38	138,00
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	135,52	145,73	150,86	155,59	164,63
3. Konsumsi Pemerintah	131,67	139,19	146,81	155,69	166,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	123,59	128,17	135,94	140,44	144,99
4.a. Bangunan	124,34	128,89	137,52	141,89	146,47
4.b. Non-Bangunan	119,17	123,70	125,98	131,21	135,38
5. Perubahan Inventori	167,89	172,06	176,68	176,87	184,99
6. Ekspor	133,60	137,13	141,38	150,02	161,72
7. Impor	143,78	143,59	149,40	157,71	172,11
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	117,21	123,53	129,04	133,18	137,24

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,14	3,25	4,29	3,03	4,56
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,86	3,23	5,31	2,97	3,89
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,40	1,32	5,06	4,62	6,92
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,54	2,80	3,03	2,68	4,08
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,75	7,47	3,92	4,20	5,58
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,83	2,24	3,23	2,68	4,14
1.f. Hotel dan Restoran	5,01	4,52	5,41	3,32	5,67
1.g. Lainnya	4,87	3,44	5,13	3,14	5,84
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,61	7,53	3,52	3,13	5,81
3. Konsumsi Pemerintah	1,16	5,71	5,47	6,05	7,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,91	3,71	6,06	3,31	3,24
4.a. Bangunan	5,04	3,66	6,69	3,18	3,23
4.b. Non-Bangunan	4,08	3,80	1,84	4,16	3,17
5. Perubahan Inventori	22,57	2,49	2,68	0,11	4,59
6. Ekspor	7,45	2,64	3,10	6,11	7,80
7. Impor	9,67	(0,13)	4,04	5,56	9,13
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	2,78	5,39	4,46	3,20	3,05

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. , *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
3. _____, *Jawa Timur Dalam Angka*, berbagai seri, Surabaya.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Proyeksi Penduduk 2010-2035*, berbagai seri, Jakarta
6. , *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, berbagai seri, Surabaya.
8. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
11. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
12. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
13. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
14. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
15. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
16. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
17. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
18. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

19. , *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
20. , *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
21. , *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
22. , *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
23. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
24. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
25. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.